

PENDIDIKAN MULTIKULTURAL DAN PENGAJARAN BAHASA ASING

Dedi Irwansyah

STAIN Jurai Siwo Metro Lampung, Indonesia

irwansyah_d@yahoo.com

Abstrak

Masyarakat Indonesia percaya bahwa dasar-dasar pendidikan multikultural telah ditetapkan oleh para pendiri bangsa, khususnya melalui pelestarian bahasa daerah dan nasional. Seiring hubungannya kedua bahasa tersebut dengan bahasa asing, konsep multikultural itu sendiri ternyata perlu didefinisikan ulang. Tulisan ini mengkaji pentingnya perspektif pengajaran bahasa asing dalam mendefinisikan ulang fenomena pendidikan multikultural. Asumsi dasar yang dibahas adalah bahwa bahasa tidak monolitik karena mengandung sejarah, budaya, dan pengetahuan masyarakat. Ketika dua bahasa berhubungan, baik itu tingkat regional atau nasional, kompetensi lintas budaya diperlukan dalam rangka menghargai perbedaan antara budaya. Kegagalan dalam memahami perbedaan pada umumnya mengarah ke konflik. Secara khusus, tulisan ini membahas pengaruh kontak bahasa, bahasa, ambivalensi budaya, kompetensi lintas budaya dalam pengajaran bahasa asing, dan hubungan antara pengajaran bahasa asing dan pendidikan multikultural.

Kata Kunci: Kompetensi Lintas Budaya, Pendidikan Multikultural, Pengajaran Bahasa Asing.

Abstract

MULTICULTURAL EDUCATION AND FOREIGN LANGUAGE INSTRUCTION. Indonesians believe that the foundations of multicultural education have been set by the founding fathers of the nation particularly through the preservation of both regional and national languages. In the wave of language contact with foreign languages, the concept of multicultural itself apparently needs to be redefined. This writing views the importance of foreign language instruction perspective in redefining the phenomenon of multicultural education. The basic assumption explored is that language is not monolithic since it contains the history, culture, and knowledge of a society. When two languages contact, be it regional or national level, cross-cultural competencies are needed in order to appreciate the differences between the cultures. The failure in understanding the existing differences commonly leads to conflict. Specifically, this writing discusses the influence spectrum of language contact, language and culture ambivalence, cross-cultural competency in foreign language instruction, and relationship between the foreign language instruction and multicultural education.

Keywords: Cross-Cultural Competency, Multicultural Education, Foreign Language Instruction.

A. Pendahuluan

Di dalam sebuah buku teks bahasa Inggris di Indonesia bertajuk *English for Academic Purposes*, disajikan sebuah wacana tentang perjuangan Martin Luther King, Jr. untuk menghapus perbedaan perlakuan yang didasarkan pada perbedaan warna kulit di Alabama, Amerika. Secara politis, warga berkulit hitam harus menjadi warga kelas dua dan hidup di bawah hegemoni warga berkulit putih. Martin menghendaki persamaan hak dan menginginkan masyarakat menilai orang lain berdasarkan karakter diri dan bukan berdasar warna kulit. Orasi yang disampaikan oleh Martin di Lincoln Memorial pada tahun 1963 menggugah banyak pihak untuk mengakui persamaan hak. “*I have a dream that my four children will one day live in a nation where they will not be*

judged by the color of their skin but by the content of their character."¹ Banyak yang meyakini bahwa Martin terinspirasi oleh Henry David Thoreau dan Mohandas (Mahatma) Gandhi, dan tidak sukar untuk mengakui bahwa wacana multikulturalisme sedikit banyak diwarnai oleh semangat yang pernah didengungkan beberapa dekade lalu oleh individu semacam Martin. Pengaruh dari semangat persamaan hak dapat menyebar melintasi batas negara dan meretas ragam dimensi.

Fenomena perlakuan berbeda karena perbedaan warna kulit memang tidak terjadi di konteks Indonesia, namun tindak kekerasan yang diduga dilatarbelakangi oleh perbedaan ideologi, budaya, pandangan, dan etnis tidak jarang mewarnai perjalanan sejarah bangsa ini. Konflik ideologis tidak hanya terjadi antaragama namun juga intraagama. Begitu juga halnya dengan tawuran yang tidak hanya melibatkan kelompok terdidik tetapi juga telah merambah masyarakat yang bermukim di pedesaan. Banyak faktor yang dapat diajukan sebagai penyebab namun faktor yang paling esensi adalah kegagalan dalam merespon perbedaan secara bijak. Untuk menyikapi ragam perbedaan atau kemajemukan, yang bersifat kodrati adanya (*given*), diperlukan *political will* yang salah satunya adalah melalui jalur pendidikan yang memberikan penekanan terhadap arti penting menghargai dan mengapresiasi perbedaan budaya. Dewasa ini, dikenal dengan istilah pendidikan multikultural (*multicultural education*).

Tulisan ini mencoba melihat fenomena pendidikan multikultural dari sudut pandang pengajaran bahasa asing di Indonesia. Asumsi dasar yang dikembangkan adalah bahwa interaksi kultural umumnya terjadi bersamaan, jika tidak bermula dari kontak dua bahasa berbeda yang melahirkan terminologi bahasa asli (*native*) dan bahasa asing (*foreign*). Kontak dua bahasa atau lebih tidak jarang melahirkan 'persaingan' atau pengaruh, untuk alasan apa pun, yang pada gilirannya mencetuskan upaya pemertahanan bahasa. Secara lebih spesifik, tulisan ini membahas:

¹Anita Lie dan Sarah Limuil, *Beyod the Classroom: English for Academic Purposes* (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2001), hlm. 19.

(1) spektrum pengaruh kontak bahasa; (2) ambivalensi bahasa dan budaya; (3) kompetensi lintas budaya dalam pengajaran bahasa asing; dan (4) pengajaran bahasa asing dan pendidikan multikultural.

B. Pembahasan

1. Spektrum Pengaruh Kontak Bahasa

Di dalam konteks dunia yang semakin mengglobal, interaksi antarbangsa yang berimbas pada interaksi bahasa, budaya, dan bahkan ideologi menjadi tidak terhindarkan. Sebagai dampak dari kontak pada tataran bahasa, terdapat peluang di mana suatu bahasa asing (*foreign language*) mewarnai dan bahkan mendominasi bahasa asli (*heritage language*) terutama dalam konteks-konteks tertentu seperti penggunaan istilah kunci, diskusi ilmiah, dan lain sebagainya. Sedang pada tataran budaya, terjadi akulturasi yang menggabungkan dimensi asal budaya dengan warna lokal yang ada. Sementara itu, kontak budaya dan bahasa dapat saja berlanjut pada interaksi ideologis yang berdampak pada perilaku atau tipologi pola pendidikan.

Comrie mengajukan istilah *heritage language*, *dominant language*, dan *language shift* sebagai salah satu dampak dari fenomena globalisasi dan multikulturalisme. Sebuah masyarakat yang pada awalnya menggunakan bahasa tunggal (*monolingual*) dan menganut satu budaya yang sama (*monocultural*) dapat mengalami fenomena multikultural sebagai akibat dari interaksi dengan masyarakat atau komunitas lainnya. Di dalam konteks di mana bahasa asli (*heritage language*) dapat dilestarikan dengan baik, bahasa asing hanya akan mewarnai bahasa asli tersebut. Sebaliknya, jika bahasa asli tidak mendapat tempat yang baik di dalam wacana sehari-hari, bahasa asing menjelma menjadi bahasa dominan (*dominant language*) sehingga terjadilah peralihan bahasa (*language shift*) karena bahasa asing lebih sering digunakan daripada bahasa asli.²

² Bernard Comrie, "Language Shift: Biological and Psychological Perspectives" *Linguistik Indonesia*, Tahun Ke 23, Nomor 2, Agustus 2005, hlm. 139-140.

Lebih lanjut, Comrie menyatakan bahwa peralihan bahasa dapat mengakibatkan kepunahan bahasa tertentu. Diperkirakan bahwa pada abad mendatang, 3000 sampai 5000 bahasa dari sekitar total 6000 bahasa yang digunakan saat ini, terancam punah. Bahasa-bahasa tersebut mungkin tidak akan diwariskan lagi kepada generasi-generasi berikutnya. Terkait dengan hal ini, bahasa Indonesia berikut kekayaan bahasa daerah bukan pengecualian. Semuanya memiliki peluang untuk punah apabila tidak ada upaya sadar untuk melestarikannya.

Ide senada dinyatakan oleh Whalen dan Harrison yang menegaskan bahwa pada tahun 2100, menurut para ahli bahasa, diperkirakan hanya 3000 bahasa dari 6000 bahasa yang masih digunakan secara lisan oleh para masyarakat penuturnya. Secara matematis, hampir setiap 12 hari, sebuah bahasa di dunia berada dalam kepunahan. Faktor utama kepunahan tersebut adalah interaksi (*contact*) antara bahasa yang pada mulanya tersilosasi dengan sebuah bahasa yang mengglobal. Ketika isolasi berakhir, biasanya, berakhir pula karakteristik-karakteristik yang berada pada sebuah bahasa asli. Pudahnya sebuah bahasa diikuti dengan hilangnya cara hidup tradisional yang telah berlangsung dan dipraktekkan oleh generasi-generasi sebelumnya. *Much of a society's history and culture is contained in its language. To lose an ancestral language is to weaken the links to the ancestors themselves. As languages disappear, a wealth of culture, art, and knowledge disappears with them.*³ Di dalam sebuah bahasa terkandung sebuah kekayaan budaya, seni, dan pengetahuan. Karenanya, pudahnya sebuah bahasa berarti hilangnya sebuah budaya, seni, dan pengetahuan.

Fakta lain menunjukkan bahwa sebuah bahasa juga identik dengan kepercayaan-kepercayaan tertentu, misalnya bahasa Arab dengan agama Islam, bahasa Pali dengan agama Budha, bahasa Latin dengan agama Katolik, dan lain sebagainya. Tingkat keidentikan dapat mencapai tahapan di mana bahasa tersebut

³ D. Whalen, and K.D. Harrison, *The World's Endangered Language*, Microsof Student 2009 [DVD] (Redmond, WA: Microsoft Corporation, 2008).

sebaiknya atau harus digunakan ke dalam ritual keagamaan, sehingga penggunaan bahasa lokal dalam seremoni agama dapat mengurangi tingkat kesakralan.⁴ Ritual atau nilai keagamaan dapat mengejewantah di dalam dimensi budaya. Agama tidak sama dengan budaya meskipun banyak kebudayaan diwarnai oleh nilai-nilai (*values*) agama tertentu. Terkait dengan hal ini, nilai-nilai sebuah agama dapat menjelma menjadi, secara teknis sering disebut, sebuah budaya pop.

Saluz, misalnya, mengetengahkan fenomena budaya pop Islam yang marak berkembang di Indonesia dewasa ini. Simbol-simbol Islam dikemas sedemikian rupa ke dalam bentuk-bentuk memikat seperti jilbab gaul (*trendy veil*), *nasyid*, majalah Islam, kosmetik, makanan, supermarket, cafe, dan lain sebagainya, sehingga muncul sebuah fenomena lain yang disebut praktek bisnis keagamaan. Terdapat empat hal yang menarik direfleksikan dari tulisan Saluz. *Pertama*, bahwa ekspansi budaya pop Islam dalam segala bentuknya, cenderung menggunakan terminologi Arab seperti Manajemen Qalbu, Sabili, ar-Ruhul Jadid, dan lain sebagainya. *Kedua*, bahwa mungkin saja terjadi ‘persaingan budaya’ di dalam sebuah konteks budaya lokal. “*Meskipun berasal dari dunia Arab, jilbab menjadi trend yang bahkan dalam konteks Indonesia pernah mengalahkan fashion-fashion yang berasal dari dunia Barat.*”⁵ *Ketiga*, Saluz mencatat bahwa sebuah budaya global terbukti mampu terintegrasi ke dalam sebuah budaya lokal. *Keempat*, meminjam istilah Dervin dkk., bahwa proses integrasi sebuah budaya tidak mudah diprediksikan (*unpredictable*) dan cenderung menjadi sebuah proses yang tidak pernah berakhir (*never-ending process*).⁶

Merujuk pada pendapat Dervin, dkk. tentang tidak mudahnya memprediksi dampak dari interaksi antarbudaya,

⁴ Anthony Campbell, “Religion and Language”, dalam <http://www.acampbell.ukfsn.org/essays/skeptic/language.html>, diakses pada 6 Juni 2010.

⁵ Claudia Nef Saluz, “Youth and Pop Culture in Indonesian Islam”, *Studia Islamika*, Vol. 16, No. 2, 2009, hlm. 216.

⁶ F. Dervin, dkk, “Multicultural Education in Finland: Renewed Intercultural Competencies to the Rescue?”, *International Journal of Multicultural Education*, Vol. 14, No. 3, 2012, hlm. 2.

cukup masuk akal untuk menyatakan bahwa interaksi tersebut dapat berimbas pada perilaku dan tipologi pendidikan. Kohno, misalnya, menunjukkan adanya interaksi bahasa dan budaya melalui tipologi masyarakat Islam yang diajukannya: tradisional, modernis, fundamentalis, dan jihadis. Dua tipologi pertama, tradisional dan modernis, masing-masing direpresentasikan oleh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Nahdlatul Ulama banyak memainkan peran dalam pendidikan pesantren tradisional berbasis pedesaan sedangkan Muhammadiyah memiliki peran dalam pendidikan modern. Sementara itu, tipologi fundamentalis menganut paham bahwa Negara Islam sebagai bentuk negara ideal di tengah arus sekularisasi yang dibawa oleh dunia Barat. Terakhir, tipologi jihadis merujuk pada aksi kekerasan untuk mencapai sebuah tujuan. Umumnya, pemimpin kelompok jihadis pernah mengenyam pengalaman peperangan di Afganistan, Pakistan, dan Filipina.⁷ Terlihat bahwa keempat tipologi tersebut menunjukkan spektrum berbeda sebagai hasil interaksi antara ideologi ke-Islaman dengan konteks bahasa, budaya, perilaku, dan tipologi masyarakat serta pendidikan di Indonesia.

Bertolak dari uraian di atas, menjadi jelas bahwa bahasa merupakan entitas yang mengandung dimensi budaya, nilai agama, dan pola masyarakat tutur mengkonstruksi pengetahuannya. Kontak dua bahasa berarti interaksi antar dua ranah budaya dan pengetahuan yang menyertainya. Dalam interaksi tersebut, suatu bahasa dapat ‘mewarnai’ dan bahkan ‘mendominasi’ bahasa lainnya dalam spektrum yang tidak mudah diprediksi. Spektrum tersebut bisa mencakup tipologi masyarakat dan pendidikan seperti yang ditunjukkan oleh Kohno dalam konteks interaksi bahasa Arab dengan bahasa Indonesia, dan juga bisa melintasi dimensi budaya pop seperti yang dikemukakan oleh Saluz. Dengan alur semacam ini, hipotesis yang diajukan Comrie, Whalen, dan Harrison dapat terbukti terutama jika tidak ada upaya untuk mempertahankan dan melestarikan bahasa asli.

⁷ Takeshi Kohno, “Political Background of Islamic Educational Institution”, *Studia Islamika*, Vol. 16, No. 2, 2009, hlm. 204.

2. Ambivalensi Bahasa dan Budaya

Bertolak dari penjelasan tentang imbas dari kontak dua bahasa dan budaya, fenomena ambivalensi atau kegamangan bisa saja muncul ke permukaan. Yaitu, antara mengambil kebijakan untuk mempertahankan satu bahasa yang sama (*monolingual*) dan satu budaya yang sama (*monocultural*) atau membuat keputusan untuk bersikap terbuka terhadap bahasa dan budaya lain. Kebijakan pertama mungkin akan membuat suatu masyarakat menjadi terisolir, sedang kebijakan kedua berpeluang menghasilkan kepunahan bahasa, budaya, seni, dan bahkan hubungan dengan leluhur yang dipertautkan oleh bahasa.

Bertalian dengan ambivalensi bahasa dan budaya, sebuah fakta menarik diketengahkan oleh Davis, yaitu tentang Nepal yang kini merupakan sebuah Negara multibudaya, multibahasa, dan multietnik setelah memiliki sejarah panjang sebagai Negara yang menerapkan politik monobahasa dan monobudaya. Pada tahun 1760-an, secara ideologis, Nepal hanya mengakui bahasa Nepali dan budaya Hinduisme. Hirarki atau sistem kasta yang terdapat dalam system budaya Hinduisme melahirkan hegemoni berupa ketidakadilan sosial, keterasingan, penghinaan bagi kasta-kasta rendah. Akibatnya, kasta-kasta rendah melakukan resistensi terhadap hegemoni bahasa dan kultural tersebut. Barulah setelah era 1990, didukung oleh atmosfer demokrasi, Nepal menjelma menjadi sebuah Negara multibudaya, multibahasa, dan multietnik. Etnis-etnis yang berjumlah lebih dari 50, membentuk sebuah federasi, *Nepal Federation of Indigeneous Nationalities*, yang bertujuan untuk mempromosikan bahasa, literatur, naskah, agama, budaya, dan bentuk pendidikannya masing-masing. Melalui pergerakan-pergerakan yang bertujuan untuk mendapatkan kembali budaya, bahasa, territorial, agama, dan identitas sosial yang pernah hilang, federasi tersebut berhasil merubah sejarah bangsa yang awalnya menganut sistem monarki menjadi negara republik.⁸ Sampai pada

⁸K.A. Davis, P. Phyak, dan TTN. Bui, "Multicultural Education as Community Engagement: Policies and Planning in a Transnational Era", *International Journal of Multicultural Education*, Vol. 14, No. 3, 2012, hlm. 4-5.

titik tertentu, fakta sejarah ini menunjukkan upaya sadar sebuah masyarakat atau sebuah etnis untuk mempertahankan warisan budaya nenek moyang. Namun pada dimensi lain, beberapa isu kritis mungkin saja dilontarkan, seperti: tidakkah akan lebih baik jika seluruh masyarakat dunia dipersatukan oleh sebuah bahasa dan budaya yang sama? Tidakkah akan lebih baik jika sebuah kebudayaan unggul diadopsi bersama oleh semua masyarakat dunia?

Terkait dengan pertanyaan di atas, Comrie tampaknya memiliki jawaban yang simpatik. Menurutnya, sebuah masyarakat yang sedang mengalami peralihan dari *monolingualism* menuju *bilingualism* hendaknya mampu menjaga bahasa asli (*heritage language*) dari pengaruh bahasa lain yang secara sosial yang mungkin saja, di dalam konteks tertentu, lebih dominan pemakaiannya. Di dalam dunia yang semakin mengglobal dan di dalamnya fenomena sentralisasi, sebuah populasi atau masyarakat tutur dapat menjaga bahasa dan budaya tradisional mereka dan pada waktu yang bersamaan turut berpartisipasi di dalam masyarakat nasional dan internasional.⁹ Jalan keluar di atas tidaklah mudah dan tidak berarti mustahil. Salah satu instrumen yang harus dikembangkan adalah melalui pendidikan bahasa asing melalui pendekatan pemahaman antarbudaya (*intercultural* atau *multicultural*). Pendekatan semacam ini juga diharapkan dapat menanam kesadaran bahwa pembahasan tentang budaya hendaknya tidak menyangkut tentang budaya mana yang lebih unggul, namun bahwa budaya-budaya itu berbeda.

3. Kompetensi Lintas Budaya dalam Pengajaran Bahasa Asing

Pendidikan yang mengakomodir ragam latar budaya tampaknya tidak dapat dihindari di tengah arus budaya pop dewasa ini di Indonesia. Fenomena pergeseran bahasa dan geger budaya merupakan tantangan nyata di antara banyak tantangan

⁹ Bernard Comrie, "Language Shift: Biological and Psychological Perspectives", *Linguistik Indonesia*, Tahun ke 23, Nomor 2, Agustus 2005, hlm. 140.

lainnya. Untuk itu, diperlukan kompetensi lintas budaya (*cross-cultural competence*) sehingga seseorang dapat mempertahankan bahasa dan budaya aslinya dan pada waktu yang bersamaan dapat berinteraksi dengan bahasa dan budaya lain. Dalam hal ini, pendidikan menjadi sebuah instrumen yang sangat strategis.

Secara teoritis, Indonesia merupakan Negara multikultural karena terdiri dari berbagai budaya, adat istiadat, dan ragam kebiasaan. Ketiga komponen tersebut umumnya terikat menjadi satu (*integrated/embedded*) dengan etnis, bahasa, dan kultur. Secara historis, para pendiri bangsa, melalui *Soempah Pemoeda* tahun 1982, telah meletakkan dasar-dasar yang kokoh untuk menyelesaikan masalah-masalah kebahasaan yang dapat muncul di dalam sebuah Negara multicultural. Yaitu bahwa secara politis telah ditetapkan tiga buah bahasa berikut fungsinya masing-masing di Indonesia: bahasa nasional Indonesia, bahasa daerah, dan bahasa asing. Bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa nasional, sebagai lambang kebanggaan nasional, dan alat komunikasi intrabangsa. Sedang bahasa daerah berfungsi sebagai lambang kedaerahan dan alat komunikasi intrasuku, sementara bahasa asing berfungsi sebagai media komunikasi antar-bangsa dan alat untuk mengeksplorasi ilmu pengetahuan. Sejauh ini, fungsi ketiga bahasa tersebut tidak menimbulkan masalah. Masalah justru muncul dari penguasaan bahasa Indonesia masyarakat yang diketahui masih membutuhkan pembinaan dan peningkatan.¹⁰ Secara praktis, fungsi-fungsi tersebut di atas seringkali mengalami bias, terutama yang berkaitan dengan fungsi bahasa asing. Tidak sedikit media elektronik atau cetak yang berskala nasional di Indonesia mencantumkan atau menggunakan bahasa asing meskipun dalam persentase yang tidak terlalu banyak.

Penggunaan bahasa asing, terutama bahasa Inggris, dalam segala bentuknya di Indonesia sangat terkait dengan pengajaran bahasa asing di pedidikan formal maupun informal. Beberapa bahasa asing telah diperkenalkan bahkan sejak usia dini.

¹⁰ Abdul Chaer dan Leonie Agustina, *Sosiolinguistik: Perkenalan Awal* (Jakarta: Rineka Cipta, 1995), hlm. 231-233.

Seringkali *prestise* sebuah lembaga pendidikan, dari tingkat dasar hingga pendidikan tinggi, diidentikkan dengan penguasaan bahasa Inggris dan atau bahasa asing lainnya. Di dalam diskursus pengajaran bahasa asing di Indonesia, tentu banyak faktor atau variabel yang dapat diperhitungkan dalam menentukan tingkat atau probabilitas kesuksesan pengajaran itu sendiri. Salah satunya adalah kompetensi lintas budaya yang dimiliki oleh pendidik.

Menurut Seeberg dan Minick, para pendidik bahasa asing harus memiliki pengetahuan, kemauan, dan keterampilan untuk memperkenalkan dan melibatkan para serta didik ke dalam sebuah konteks dunia global. Pengenalan dan pelibatan lintas budaya (*cross-cultural disposition*) tersebut seyogianya dilakukan secara transformatif atau melalui pengalaman praktis (*cross-cultural encounter*), dan bukan teoritis, tentang budaya lain. Secara transformatif juga berarti bahwa peserta didik tidak hanya mendapatkan pengetahuan tentang budaya lain secara kognitif dan secara abstrak.¹¹ Upaya para pendidik untuk memperkenalkan budaya lain bukannya tanpa masalah karena upaya tersebut dapat menjelma menjadi pisau bermata dua.

Menurut Brown, sebagian besar peserta didik mungkin akan mendapatkan keuntungan dari proses pembelajaran lintas budaya meskipun tidak dapat dipungkiri juga bahwa terdapat peserta didik yang mengalami dampak kurang positif dalam bentuk hambatan psikologis (*psychological blocks*) dan efek negatif lainnya sebagai imbas dari kontak dengan budaya lain. Sehingga, peran pendidik yang memahami landasan teoritis dan filosofis pembelajaran lintas budaya, sangat diperlukan. Misalnya, pendidik dapat menggunakan ragam materi ajar dan teknik seperti simulasi, film, bahan bacaan yang relevan untuk mempermudah proses asimilasi budaya.¹² Tujuan dari pengetahuan lintas budaya adalah mengantisipasi imbas negatif yang diakibatkan oleh perbenturan

¹¹ Vilma Seeberg and Theresa Minick, "Enhancing Cross-cultural Competence in Multicultural Teacher Education: Transformation in Global Learning", *International Journal of Multicultural Education*, Vol. 14, No. 3, 2012, hlm.1-2.

¹² H. Douglas Brown, *Principles of Language Learning and Teaching (Fourth Edition)* (New York: Addison Wesley Longman, Inc., 2000), hlm. 189.

budaya. Hal ini dapat dilakukan, misalnya, melalui eksplorasi fakta sejarah seperti yang dilakukan oleh Anita Lie dan Sarah Limuil yang memperkenalkan nilai penting multikulturalisme melalui kisah Martin Luther King, Jr., sebagaimana yang dinukilkan pada bagian awal tulisan ini.

Bentuk lain dari hambatan psikologis mungkin dialami oleh peserta didik yang mempelajari bahasa asing adalah fenomena geger budaya (*culture shock*). Gebhard mendeskripsikan gejala dan upaya penanggulangan geger budaya melalui tiga tahapan yaitu: identifikasi, penerimaan, dan perlakuan. Proses identifikasi dapat dilakukan melalui refleksi dan kontemplasi terhadap perasaan dan perilaku. Umumnya gejala-gejala geger budaya terlihat melalui beberapa indikator seperti depresi, gugup, sensitif, dan perasaan tidak betah (*homesick*). Gejala-gejala tersebut biasanya membuat peserta didik menarik diri dari pergaulan dan meluangkan banyak waktu untuk tidur, menghindari sesuatu yang bertalian dengan budaya kedua, dan menghabiskan banyak waktu dengan orang yang memiliki budaya yang sama dengannya. Sementara itu, proses penerimaan merujuk pada pengakuan terhadap gejala-gejala geger budaya. Pengakuan itu sendiri bersifat terapis sehingga keadaan mengakui dan menerima gejala-gejala geger budaya tersebut menjadi bagian dari proses perlakuan atau penyembuhan. Selanjutnya, proses perlakuan berisikan sugesti diri bahwa geger budaya yang dialami tidak akan berlangsung lama. Sugesti seperti ini perlu ditindaklanjuti dengan melakukan sesuatu yang berlawanan dengan gejala-gejala penyebab geger budaya.¹³

Gejala-gejala geger budaya mungkin juga disebabkan oleh perbedaan nilai atau prinsip keagamaan antara atau antarpeserta didik dengan pendidik. Di dalam konteks Indonesia yang multiagama, perbedaan ideologis tidak sering menjadi masalah,

¹³ Jerry G. Gebhard, *Teaching English as a Foreign or Second Language: A Teacher Self-development and Methodology Guide* (Michigan: The University of Michigan, 2000), hlm.130.

terutama di institusi pendidikan berbasis agama Islam (madrasah). Hal ini karena terdapat kecenderungan di mana pendidik dan peserta didik memiliki pandangan keagamaan yang sama. Namun pada konteks sekolah-sekolah umum perbedaan tersebut menjadi tidak terhindarkan. Dalam hal ini, fenomena geger budaya dan multikultur menjadi lebih kompleks. Seorang pendidik bahasa Inggris, misalnya, harus memperkenalkan budaya asing dan mempromosikan dunia yang menggelobal, sementara pada saat bersamaan sang pendidik memiliki latar belakang agama yang berbeda dari peserta didik.

Gambaran di atas dapat berkembang menjadi lebih kompleks ketika dilakukan pemetaan terhadap latar belakang regional peserta didik. *Pertama*, jika peserta didik berasal dari daerah dan kemudian belajar bahasa asing berikut muatan budayanya di daerah ia menetap, maka ia berpeluang mengalami satu episode geger budaya. *Kedua*, peserta didik yang berasal dari daerah lalu pindah ke perkotaan dan mempelajari bahasa asing berikut muatannya, maka ia berpeluang mengalami dua episode geger budaya. Ia harus menyesuaikan diri dengan kemajemukan perkotaan dan harus mempelajari bahasa dan budaya asing pada waktu yang bersamaan. Pada fase semacam ini, rasanya sukar bagi peserta didik untuk tidak membandingkan dan pada akhirnya memberikan penilaian terhadap budaya yang 'lebih baik' daripada budaya lainnya. Namun, justru pada fase semacam ini diperlukan seorang guru profesional yang mampu meyakinkan bahwa tujuan dari mempelajari atau mengetahui budaya lain adalah bukan untuk memberikan penilaian tetapi untuk memahami bahwa di dunia ini terdapat beraneka ragam budaya berbeda yang selanjutnya dikenal dengan istilah teknis multikultural.

Terkait dengan fenomena di atas, Alip (dalam Mambu) menyatakan bahwa di tengah arus perbedaan budaya dan latar belakang keagamaan, kepribadian simpatik seorang pendidik sangat diperlukan. Kepribadian merupakan fungsi dari beberapa faktor, di antaranya adalah latar belakang individu, termasuk latar belakang keagamaan, dan latar belakang pendidikan profesional.

Seorang pendidik yang memiliki latar belakang keagamaan yang berbeda dari peserta didiknya, tidak diperbolehkan menghalangi atau mengganggu konsep atau ritual keagamaan peserta didiknya. Sebaliknya, pendidik harus memperkaya pengalaman peserta didiknya tanpa mengorbankan nilai-nilai teologis yang dimilikinya.¹⁴ Dengan kata lain, pendidik dan peserta didik dapat menumbuhkan kepribadian simpatik masing-masing melalui toleransi dan apresiasi meskipun memiliki latar belakang agama dan budaya yang berbeda.

4. Pengajaran Bahasa Asing dan Pendidikan Multikultural di Indonesia

Bagian ini mencoba memilin benang merah dari beberapa sub-bahasan yang telah diperikan sebelumnya. Pertama, bertolak dari fakta sejarah yang menunjukkan bahwa perbedaan warna kulit, ideologi, kebudayaan, bahasa, dan perbedaan-perbedaan lainnya, dapat menimbulkan konflik horizontal yang dampak atau imbasnya tidak mudah diprediksi (*unpredictable*). Dampak yang paling nyata adalah munculnya hegemoni dari budaya, dalam arti yang paling luas, yang kuat terhadap budaya minoritas. Tidak jarang hegemoni tersebut berujung pada revolusi berdarah seperti dalam kasus Martin Luther King, Jr. atau revolusi yang relatif lebih ‘damai; seperti dalam kasus beralihnya Nepal dari sebuah Negara monobahasa dan monobudaya menjadi Negara multikultural.

Penerapan pendidikan multikultural di Indonesia, secara teoritis, dihadapkan pada tipologi masyarakat multibahasa, multietnis, dan multi agama. Hal yang terakhir disebut masih dapat dijabarkan lebih jauh lagi, misalnya tipologi masyarakat Islam yang diajukan oleh Kohno: tradisional, modernis, fundamentalis, dan jihadis. Keempat tipologi tersebut sangat mungkin memiliki penerimaan yang berbeda terhadap pembelajaran bahasa dan budaya asing, terutama bahasa Inggris yang secara ideologis berada dalam jarak yang tidak

¹⁴Joseph Ernest Mambu, *Personalizing Critical Pedagogies in Foreign Language Education* (Yogyakarta: Sanata Dharma University Press, 2010).

sama dengan bahasa Arab. Perbedaan ideologis antara pendidik dan peserta didik merupakan faktor lainnya yang memperkaya cakrawala multikultur di Indonesia. Adalah dalam latar belakang semacam ini, pemahaman lintas budaya diperlukan oleh pendidik dan peserta didik untuk mengurangi kemungkinan konflik yang mungkin terjadi atas nama perbedaan budaya baik dalam tingkat lokal, nasional, maupun internasional.

Menurut Hanum, untuk mengintegrasikan muatan multikultural ke dalam pembelajaran di sekolah, para pemerhati pendidikan di Indonesia dapat mempertimbangkan empat pendekatan multikultural sebagaimana yang diajukan oleh Banks, yaitu: pendekatan kontribusi, pendekatan aditif, pendekatan transformasi, dan pendekatan aksi sosial. Pendekatan kontribusi dilakukan dengan memasukkan figur pahlawan atau simbol yang merepresentasikan suku, etnis, atau bangsa ke dalam bahan ajar. Pendekatan aditif dilakukan dengan cara memasukkan materi kebudayaan ke dalam kurikulum tanpa mengubah struktur dan tujuan utama kurikulum, sedangkan pendekatan transformasi dilakukan dengan tujuan untuk mengubah asumsi dasar kurikulum. Terakhir, pendekatan aksi sosial bertujuan untuk membekali peserta didik dengan keterampilan kritik sosial dan perubahan sosial.¹⁵ Lebih lanjut dikatakan bahwa pendekatan dan bentuk implementasi pendidikan multikultural tidak selalu sama di setiap negara bergantung pada analisis kebutuhan dan tujuan yang hendak dicapai.

Meskipun bersifat lentur, bentuk implementasi pendidikan multikultural di Indonesia perlu mempertimbangkan kriteria atau standar tertentu. Seeberg dan Minick pernah membuat empat standar kompetensi lintas budaya, yaitu: (a) penguatan kesadaran kultural; (b) kontak positif antarkelompok melalui upaya untuk meminimalisir syakprasangka antarkelompok; (c) penerimaan,

¹⁵ Farida Hanum, “*Pendidikan Multikultural Sebagai Sarana Membentuk Karakter Bangsa*”, Makalah disampaikan pada Seminar Regional DIY-Jateng dan Sekitarnya yang diselenggarakan Himpunan Mahasiswa Pendidikan Sosiologi Universitas Negeri Yogyakarta, tanggal 14 Desember 2009, di Rektorat Universitas Negeri Yogyakarta.

penghormatan (*respect*), dan apresiasi terhadap individu yang memiliki budaya berbeda; dan (d) perspektik anti-rasis, anti disparitas gender, anti imperialis dan pro aksi keadilan sosial.¹⁶ Keempat standar tersebut dapat saja dirangkum ke dalam sebuah mata pelajaran atau disisipkan ke dalam pelajaran-pelajaran yang sesuai.

Kiranya pengajaran bahasa asing, seperti bahasa Arab dan bahasa Inggris, memiliki peluang yang besar untuk menanamkan kesadaran lintas budaya sekaligus mengejewantahkan standar pendidikan multikultural yang ditetapkan sebelumnya. Dengan pajanan (*exposure*) berimbang antara budaya lokal, nasional, dan internasional serta pembelajaran lintas budaya yang berorientasi pada pengalaman praksis (*cross-cultural encounter*), tindak kekerasan atas nama perbedaan bahasa dan budaya dapat dielakkan.

C. Simpulan

Pendidikan multikultural sejatinya telah telah digagas oleh para pendiri bangsa Indonesia terutama melalui penetapan bahasa nasional dan pemertahanan bahasa regional sebagai simbol negara persatuan yang majemuk. Kehadiran bahasa asing telah membuat kontak bahasa dan budaya dengan rentang spektrum yang tidak selalu dapat direspon secara positif. Untuk itu, pendidikan multikultural yang disisipkan ke dalam pengajaran bahasa asing diharapkan mampu mengatasi reaksi negatif yang mungkin muncul karena perbedaan budaya.

¹⁶ Vilma Seeberg and Theresa Minick, "Enhancing Cross-cultural Competence in Multicultural Teacher Education: Transformation in Global Learning", *International Journal of Multicultural Education*, Vol. 14, No. 3, 2012, hlm. 4-5.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Chaer dan Leonie Agustina, *Sosiolinguistik: Perkenalan Awal*, Jakarta: Rineka Cipta, 1995.
- Anita Lie dan Sarah Limuil, *Beyond the Classroom: English for Academic Purposes*, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2001.
- Anthony Campbell, "Religion and Language", dalam <http://www.acampbell.ukfsn.org/essays/skeptic/language.html>, diakses pada tanggal 6 Juni 2010.
- Bernard Comrie, "Language Shift: Biological and Psychological Perspectives", *Linguistik Indonesia*, Tahun Ke 23, Nomor 2, Agustus 2005.
- Claudia Nef Saluz, "Youth and Pop Culture in Indonesian Islam", *Studia Islamika*, Vol. 16, No. 2, 2009.
- Davis, K.A., P. Phyak, , dan TTN. Bui, "Multicultural Education as Community Engagement: Policies and Planning in a Transnational Era", *International Journal of Multicultural Education*, Vol. 14, No. 3, 2012.
- Dervin, F., dkk., *Multicultural Education in Finland: Renewed Intercultural Competencies to the Rescue?*, *International Journal of Multicultural Education*, Vol. 14, No. 3, 2012.
- Farida Hanum, "Pendidikan Multikultural sebagai Sarana Membentuk Karakter Bangsa", Makalah disampaikan pada Seminar Regional DIY-Jateng dan Sekitarnya yang Diselenggarakan Himpunan Mahasiswa Pendidikan Sosiologi Universitas Negeri Yogyakarta, tanggal 14 Desember 2009 di Rektorat Universitas Negeri Yogyakarta.
- H. Douglas Brown, *Principles of Language Learning and Teaching (Fourth Edition)*, New York: Addison Wesley Longman, Inc., 2000.

Dedi Irwansyah

- Jerry G. Gebhard, *Teaching English as a Foreign or Second Language: a Teacher Self-development and Methodology Guide*, Michigan: The University of Michigan, 2000.
- Joseph Ernest Mambu, *Personalizing Critical Pedagogies in Foreign Language Education*, Yogyakarta: Sanata Dharma University Press, 2010.
- Takeshi Kohno, “Political Background of Islamic Educational Institution”, *Studia Islamika*, Vol. 16, No. 2, 2009.
- Vilma Seeberg and Theresa Minick, “Enhancing Cross-cultural Competence in Multicultural Teacher Education: Transformation in Global Learning”, *International Journal of Multicultural Education*, Vol. 14, No. 3, 2012.
- Whalen, D., and K. D. Harrison, *The World's Endangered Language*, Microsoft® Student 2009 [DVD], Redmond, WA: Microsoft Corporation, 2008.